

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Kemiskinan dihadapi semua Negara di dunia terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan muncul sebab adanya ketidakmampuan dari sebagian masyarakat. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia menurun, menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Lingkaran kemiskinan pun terus berlanjut, karena masyarakat dengan pendapatan rendah kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan gizi yang memadai. Fasilitas ini meningkatkan kualitas intelektual dan fisik sumber daya manusia, yang menurunkan produktivitas. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang mempengaruhi setiap orang pada tahapan pembangunan. Banyak isu sosial negatif terjadi karena kemiskinan yang meluas (Kurniawan, 2011). Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan sulit untuk dihilangkan salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan (Yusuf and Summer, 2015).

Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi paling tinggi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah. Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi

juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Selain itu kemiskinan juga disebabkan karena banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akan akses terhadap pelayanan dasar seperti keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga BBM, tarif dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1995). kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau sisi tidakmampuan ekonomi (BPS). Kemiskinan adalah salah satu isu krusial, karena kemeralatan mencangkup pemenuhan kebutuhan yang sangat esensial sepanjang kehidupan

sehari hari dan kemiskinan suatu isu dunia karena diliat oleh setiap bangsa (Yocoub, 2012). Salah satu penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia (2004) adalah kurangnya aset dan pendapatan (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). kemiskinan juga ada hubungannya dengan pembatasan pekerjaan dan biasanya klasifikasi orang miskin tidak memiliki suatu pekerjaan (pengangguran), Tingkat pendidikan dan kesejahteraan pada umumnya kurang (Darmawan, 2021).

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Sudah lebih dari 3 setengah abad Indonesia dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan negara lain Indonesia masih jauh dari harapan kemakmuran dan kesejahteraan. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, dahulunya pada awal kemerdekaannya tahun 1965 Singapura memiliki masalah yang kompleks. Namun pada masa sekarang ini Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. Berbeda dengan Indonesia setelah berjalannya waktu perekonomian Indonesia masih berada pada negara berkembang. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, meningkatnya angka pengangguran, dan jumlah penduduk yang tidak terbendung jumlahnya.

Namun dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung turun. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda, 2011).

Maipita, (2014) Kemiskinan sering menjadi masalah krusial bagi seluruh negara dari dulu hingga sekarang. Hal ini tak hanya menjadi perhatian politik dan pemerintahan, tetapi juga menjadi fokus dalam berbagai ajaran agama. Dalam mengatasi kemiskinan, setiap majelis bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah tersebut. Meskipun pengurangan kemiskinan telah dimulai pada waktu yang lalu oleh semua negara termasuk wilayah dunia, sampai saat ini belum juga selesai. Di Jurnal (Darmawan, 2021) Data di BPS menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi jumlah orang yang membutuhkan, namun dampak perubahan tersebut belum terlihat, bahkan lebih memprihatinkan setiap tahunnya (Wongdesmiwati, 2009). Setelah menurun sekitar tahun 2017, bentuk kemiskinan yang pernah terjadi di Indonesia kini kembali meningkat. *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyebut, naiknya tingkat kemiskinan disebabkan pada saat Pandemi Virus Corona yang mempengaruhi perekonomian daerah setempat. Adanya Pandemi Virus Corona memiliki dampak yang luar biasa, yaitu bisa

terganggunya aktivitas keuangan sehingga pada akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat.

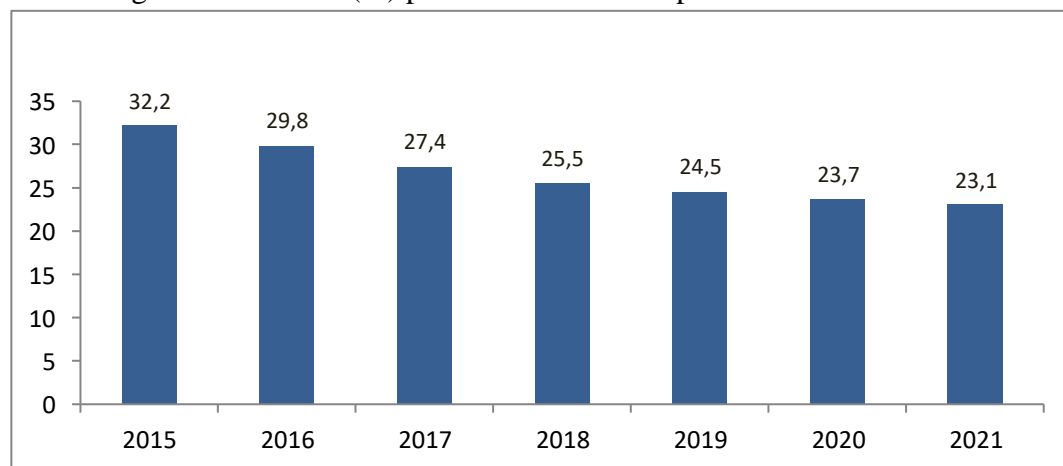
Niemietz, (2011) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, dapat metropolitan, yaitu karena padatnya penduduk sehingga kualitas peluang pekerjaan sulit di dapat, masyarakat miskin membutuhkan lebih banyak akses yang memadai, baik untuk memberikan atau membeli makanan yang dapat dikonsumsi. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di daerah pedesaan. Hal ini karena kecil kemungkinan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Darmawan, 2021).

Sepanjang sejarah negara kesatuan Indonesia, Kemiskinan telah menjadi isu yang signifikan. Isu kemiskinan muncul sebagai akibat dari kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan kurang adanya pembangunan dan investasi di berbagai sektor jutaan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan tempat tinggal, kesulitan pembiayaan perawatan kesehatan, dan peningkatan jumlah pengangguran. Akibatnya, jutaan orang tidak mampu memenuhi kabutuhan papan, pangan, dan sandang (Dora, 2017).

Program pembangunan yang dicoba oleh pemerintah Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan meningkatkan gaji masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Kemampuan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan data dari BPS Tingkat Kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Menurut data Wordbank, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2015 sampai 2021. Penurunan kemiskinan dinilai Wordbank sebagai dampak dari pemulihan ekonomi nasional yang masih terus berlanjut.

Berikut adalah perkembangan Tingkat kemiskinan di Indonesia yang diukur dalam tingkat kemiskinan (%) pada tahun 2015 sampai tahun 2021:



Sumber : Wordbank Indonesia, 2024

**Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan Di Indonesia
2015 – 2021**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2015 Tingkat kemiskinan

di Indonesia sebesar 32,2 % mengalami penurunan di tahun berikutnya. Ini suatu hasil upaya pemerintah Indonesia dalam menekan kemiskinan di Indonesia, bisa dibuktikan dalam 7 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dari sebesar 32,2 % tahun 2015 turun menjadi 23,1% pada tahun 2021. Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi dengan jumlah penduduk miskin sangat sedikit adalah provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,56 % (2021). Kemudian Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,67 %, dan Bali dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,72 %. Adapun Provinsi yang mengalami tingkat kemiskinan paling banyak yaitu provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan 26,56 %. Selanjutnya Papua Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,33 % dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,05 % (BPS Indonesia, Maret 2022).

Menurut Kuncoro, (2004) pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (Bibi, 2006). Besarnya pendapatan perkapita sering digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran di berbagai daerah (Norton, 2002). Pendapatan perkapita dapat diperoleh dari tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Sadono Sukirno, 2004:423).

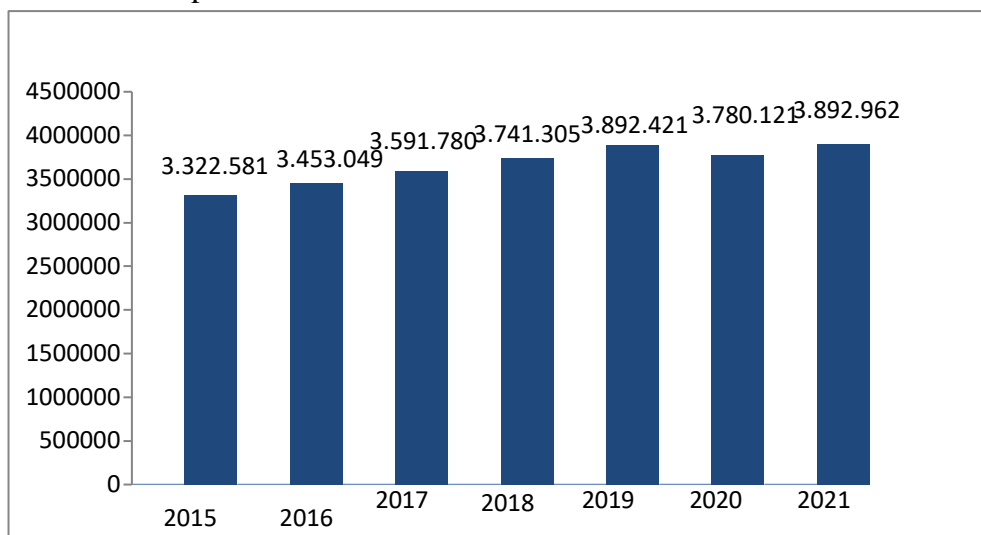
Salah satu untuk menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita di peroleh dari pendapatan pada tahun tertentu

Di bagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Jika masyarakat memiliki penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi kehidupannya dan menabung untuk biayanya di masa depan. Jika pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat itu mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara.

Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan perkapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan perkapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2009), pendapatan perkapita pada tingkat regional diartikan sebagai sebuah besaran yang dihasilkan melalui perhitungan PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Namun dalam perhitungannya, terdapat 2 macam PDRB yang biasa digunakan oleh BPS yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Dari kedua macam tersebut, PDRB ADHK adalah perhitungan yang lebih baik sebab dari pandangan Sukirno, (2021) menjelaskan bahwasannya pendapatan perkapita yang dihitung dengan menggunakan “perhitungan pendapatan perkapita menurut harga tetap atau konstan” dapat menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu wilayah tersebut. Jadi, semakin besar pendapatan perkapitanya maka daerah tersebut akan semakin makmur. Hal ini juga sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan oleh Nurkse (dalam Kuncoro, 2014) yang menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka hal tersebut akan berakhir pada kondisi keterbelakangan. Kondisi keterbelakangan disini yaitu seseorang yang dihadapkan pada kondisi kemiskinan atau serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berikut adalah perkembangan Pendapatan Perkapita di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2021:



Sumber : *Wordbank* Indonesia, 2024

Gambar 1.2 Pendapatan Perkapita Di Indonesia Tahun 2015-2021

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita di Indonesia cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2015 Pendapatan Perkapita di Indonesia sebesar 3.322.581 miliar, mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Bisa dibuktikan dalam 7 tahun terakhir Pendapatan Perkapita di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, dari sebesar 3.322.581 miliar tahun 2015 naik menjadi 3.892.962 miliar pada tahun 2021.

Hubungan antara variabel pendapatan perkapita dengan tingkat kemiskinan dapat menimbulkan perbedaan yang negatif, Semakin besar pendapatan perkapita yang dihasilkan dan didorong dengan produktifitas dan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga semakin besar taraf hidup masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hal ini tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Tamrin, 2001).

Dari beberapa penelitian sebelumnya dijelaskan adanya pengaruh positif atau pengaruh negatif dari variabel pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Resosudarmo *et al*, (2006) menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan karena dengan pendapatan perkapita tinggi yang dimiliki oleh setiap provinsi, maka akan membuat tingkat kemiskinan tersebut bisa bertambah namun tidak terlalu signifikan perubahannya. Hal ini terjadi karena pendapatan perkapita biasanya digunakan hanya untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan.

Drama Rika *et al*, (2012) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta”

dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Menyimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan DKI Jakarta. Selain itu, ada juga penelitian dari Hardityo Erik Sujatmiko, (2018) berjudul “*The Effect of Education, Percapita Income and Unemployment Malang 2001-2016*” analisis yang digunakan adalah Metode Linear Berganda, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan disignifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sudiharta & Ketut, (2014) menyatakan bahwa pendapata perkapita berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan pendapatan perkapita tidak mampu menggambarkan kesejahteraan secara utuh. Namun penelitian (I Made & Sudarsana, 2017) dengan judul “Analisis pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali” menjelaskan bahwa hubungan pendapatan perkapita dengan tingkat kemiskinan adalah negatif dan signifikan. Hal ini disebabkan provinsi Bali memiliki sektor-sektor ekonomi besar yang menjadi basis ekonomi wilayah terutama dalam sektor wisata, banyak tenaga kerja informal bekerja pada sektor parawisata menyebabkan tenaga kerja informal terserap sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang menyebabkan kesejahteraan meningkat.

Fadlill *et al*, (2016) menyatakan bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk. Variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk

miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Ridwan, (2020) Menyatakan jumlah penduduk mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan. Dampak populasi suatu masalah mendasar pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat suatu kemajuan menuju tujuan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah keseimbangan dinamis antara kekuatan penambah dan kekuatan pengurang. Jumlah penduduk meningkat disebabkan oleh bertambahnya kelahiran. Tetapi secara bersamaan jumlah penduduk dikurangi oleh kematian orang-orang pada berbagai usia. Sementara situasi yang sama juga terjadi pada migrasi dimana migran masuk kedalam suatu kawasan atau daerah yang berarti menambah penduduk. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah perbandingan antara komponen utama yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi masuk dan migrasi keluar (Bogoe, 2009 : 37).

Tingkat pertumbuhan penduduk di Negara berkembang umumnya lebih tinggi dari pada di negara maju, demikian juga tingkat pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan. (Hasibuan, 2007 : 85). Akan tetapi masalah pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar masalah mengenai jumlahnya saja, namun juga menyangkut masalah kesejahteraan umat manusia dan perkembangan ekonomi (Todaro, 2004).

Penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal disuatu tempat yang terikat oleh aturan- aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau continue. Penduduk yaitu sejumlah orang yang tinggal di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan bertujuan untuk menetap (BPS, 2014). Menurut Chairany, (2010) penduduk yaitu sejumlah orang yang berdomisili/tinggal di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan dan bertujuan menetap. Jumlah penduduk suatu negara tidak stabil karena terdapat faktor yang mempengaruhi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Model Kremerian memberikan pendapat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk adalah kunci dalam menunjukkan kesejahteraan ekonomi. Model ini beranggapan sama dengan model Nasionalis yang artinya pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan pembangunan. Kinerja perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari unsur kependudukan yang berdomisili/tinggal di wilayah tersebut. Penduduk merupakan pelaku utama kegiatan ekonomi di wilayah, oleh sebab itu struktur kependudukan sedikit banyak akan memengaruhi profil dan kinerja kegiatan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin dan Pendidikan merupakan data umum yang sering digunakan untuk menunjukkan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah (Setiono, 2011).

Berdasarkan jumlah kelahiran, populasi suatu tempat atau wilayah akan bertambah setiap tahun. Jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi pemerintah jika tidak dapat dikendalikan, jika jumlah penduduk meningkat setiap tahun maka

akan menyebabkan kemiskinan. Masyarakat salah satu sumber lapangan kerja yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pemerintah sulit memberikan pekerjaan kepada daerah setempat dengan asumsi bahwa populasinya tinggi. Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan gaji, pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, lingkungan, dan migrasi internasional merupakan tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk (Azizah *et al.*, 2018).

Menurut Todaro dan Smith, Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun (Kumalasari, 2011).

Menurut Maltus kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena itu, pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten.

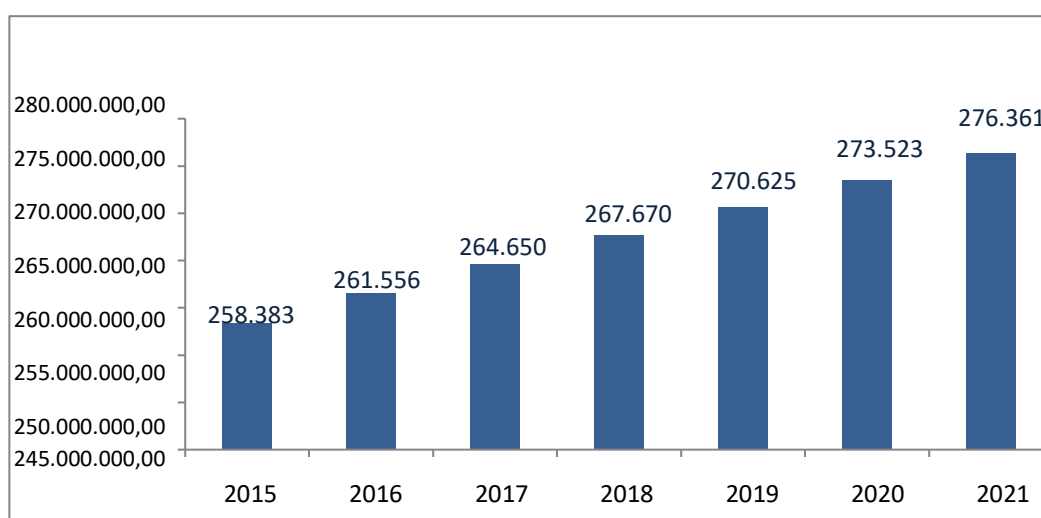
Banyak hal yang dapat dipengaruhi oleh penambahan penduduk, termasuk peningkatan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan perumahan. Selain itu, populasi yang besar juga akan menghabiskan uang pemerintah yang sangat terbatas untuk memberikan layanan kesehatan, keuangan, dan sosial yang berbeda untuk era baru. Tesis mendasar Malthus adalah bahwa populasi pada umumnya akan bertambah lebih cepat daripada persediaan makanan. Sebuah isu yang sebenarnya di angkat oleh pakar lain seperti Adam Smith dan Benjamin Franklin. Pada tesisnya disimpulkan bahwa populasi berkembang seperti deret penaksiran dan inventaris bahan makanan berkembang seperti hitungan angka cepat. Itulah yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan.

Hubungan antara variabel jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan dapat menimbulkan perbedaan yang negatif, dapat dilihat dari perkembangan penduduk yang secara pasti mempengaruhi peningkatan ekonomi yang berarti dapat menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang dapat mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Pertumbuhan penduduk tidak dapat meningkatkan produksi sekaligus menurunkan kebutuhan konsumsi produksi. Sedangkan pertumbuhan penduduk dapat berakibat negatif jika dapat menghambat pembangunan ekonomi, artinya penambahan penduduk tidak bisa meningkatkan produksi yang dapat menurunkan kebutuhan konsumsi hasil – hasil produksi. Sehingga, pembangunan ekonomi yang baik ketika pertumbuhan penduduk lebih rendah daripada pembangunan ekonomi (Agustina *et al.*, 2019).

Pertambahan penduduk yang cepat akan berdampak negatif terhadap penduduk itu sendiri, dimana akan terjadinya kerusakan lingkungan, lahan yang semakin berkurang hingga angka pengangguran yang semakin meningkat. Pada 7 tahun terakhir jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan

meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya maka banyak masalah yang akan muncul, dimana salah satunya semakin sedikit lapangan pekerjaan dan juga mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021:



Sumber: FAO Indonesia, 2024

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Di Indonesia 2015 – 2021

Data dari FAO Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 Jumlah penduduk meningkat sebesar 258.383.257 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 276.361.788 jiwa. Hal ini tentunya bisa menjadi potensi bagi pemerintah Indonesia untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan optimal. Namun, jika pemerintah Indonesia tidak mampu untuk memanfaatkan secara optimal, maka akan menjadi suatu masalah pada tahun yang akan datang yang terus menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah penduduk tertinggi berada pada provinsi Jawa Barat sebesar 48.274.162 jiwa, lalu

ada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 40.665.696 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di provinsi Kalimantan Utara sebesar 701.814 jiwa.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dijelaskan adanya pengaruh positif atau pengaruh negatif dari variabel jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Ada sejumlah jurnal yang menerbitkan penelitian menunjukkan bahwa populasi memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Dikatakan mempunyai akibat yang merugikan karena penambahan penduduk yang tidak terkendali bisa terjadi tidak tercapainya tujuan pembangunan, yaitu bantuan sosial pemerintah yang dapat mengurangi kemiskinan dan menambah pengangguran, sehingga penduduk yang besar dapat meningkatkan tingkat kebutuhan yang besar juga (Suhandi *et al.*, 2018). Dan ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan bahwa berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) yang membuat distribusi penduduk lebih didominasi oleh penduduk usia produktif (Mahsunah, n.d.). Pertambahan penduduk justru membuat kebutuhan akan cukup sering berkurang (Agustina *et al.*, 2019).

Penelitian sebelumnya ada yang mengatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena peningkatan jumlah penduduk dapat mengakibatkan peningkatan tenaga kerja, yang dapat digunakan untuk mendorong sektor produksi dan meningkatkan kegiatan perekonomian (Azizah *et al.*, 2018) mengatakan bahwa masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dengan mengandalkan pekerjaan yang dilakukannya supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Dan ada juga jurnal yang menyatakan

bahwa Jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah penduduk tiap tahun makin bertambah maka akan menyebabkan angka kemiskinan yang tinggi (Elda *et al*, 2018).

Terdapat suatu hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan, korelasi ini bisa mempunyai dampak positif maupun sebaliknya terhadap perekonomian, efek tersebut dapat diamati dari beberapa aspek sudut pandang pertumbuhan penduduk, dimana jika berdampak positif dapat mendorong pembangunan ekonomi, yang mempunyai arti bahwa jumlah orang hidup dapat mewujudkan peningkatan jumlah tenaga kerja, yang dapat memajukan berbagai sektor seperti manufaktur dan produksi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Laju ekonomi yang lambat bisa diakibatkan dari adanya pertumbuhan penduduk, hal ini terjadi bila pertumbuhan penduduk tidak membawa dampak pada peningkatan produksi, sehingga permintaan produk mengalami penurunan. Dapat di simpulkan bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk, supaya menghasilkan pembangunan ekonomi yang baik (Achmad *et al*, 2022).

Penelitian oleh Nabilla Yusrya *et al*, (2022) bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dampak yang negatif terhadap kemiskinan. Karna Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan konsumsi dimasa yang akan datang menjadi tinggi. Minimnya sumber daya perkapita menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang selanjutnya menyebabkan investasi dalam ruang lingkup Sumber Daya Manusia semakin sulit.

Penelitian Riska & Putu,(2022) berjudul “*The Effect Of Unemployment, Education And The Number Of Population On The Poverty Level Of Regency/City In Bali Province*” menggunakan metode analisis data panel, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Suhandi *et al*, (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan memakai Metode Regresi Linear di Kota Palembang. Hasil Penelitian bahwa variabel jumlah penduduk (X) mempunyai pengaruh negatif pada variabel jumlah kemiskinan di kota Palembang. Secara simultan, jumlah penduduk mempunyai pengaruh pada jumlah kemiskinan di kota Palembang yaitu 0,398%, sedangkan -14,045% serta sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda menyangkut dengan kemiskinan,pendapatan perkapita dan jumlah penduduk . Ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini yaitu:

- 1 Berapa besar pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
- 2 Berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

- 3 Berapa besar pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membagikan kontribusi buat kedepannya untuk ilmu pengetahuan yang bisa jadi rujukan untuk penelitian berikutnya mengenai pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan dan juga dapat dipakai untuk bahan pembelajaran akademik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan mengenai kemiskinan, misalnya

kebijakan dimana pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat juga mengadakan pelatihan yang bisa membantu skill seseorang atau bisa membuka usahanya sendiri sehingga hal tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Terutama terkait dengan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah – pemerintah di Provinsi lainnya.

- b. Untuk pemerintah di Negara – Negara lainnya, terutama yang memiliki karakteristik kemiskinan, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk yang sama dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di Negara - Negara lainnya.
- c. Untuk sarana belajar dan masukkan buat peneliti dalam mengaplikasikan berbagai teori yang sudah dipelajari terhadap kasus nyata yang terjadi di lapangan.